

# **Evaluasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto)**

**Arif Setiawan, Sarwono, Minto Hadi**

*Jurusan Administrasi Publik, FIA, Universitas Brawijaya, Malang  
Email: setiawan\_1112@yahoo.com*

---

## **Abstract**

*One potential area of development is the development of businesses in the informal sector as street vendors. If developed will contribute to the economic and social welfare. Many of the efforts taken by the government in the business development of street vendors. But in fact, policy solutions and programs offered by the government have not been entirely successful. This is because there are many problems in the government's approach. The purpose of this study was to determine and describe the mapping, identification of problems in the implementation of the arrangement of street vendors and evaluation of the implementation of the restructuring and development of street vendors in Mojokerto. While the research method used is a type of descriptive study with a qualitative approach. The results of this study is the implementation of the arrangement and construction of street vendors in Mojokerto are still many problems which derive from the city and from its five sidewalk. therefore there are few such evaluations: an evaluation of the demolition phase of street vendors, evaluation of the relocation or site preparation, evaluation of capital assistance given to street vendors as well as the evaluation of the development phase of street vendors themselves.*

**Keywords:** *Evaluation of policies, Empowerment of street vendors.*

---

## **Abstrak**

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima. Apabila dikembangkan akan memberikan kontribusi dalam ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam usaha pengembangan pedagang kaki lima. Tetapi pada kenyataannya, solusi kebijakan dan program yang ditawarkan pemerintah belum sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan masih terdapat banyak permasalahan dalam pendekatan yang dilakukan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menggambarkan pemetaan, identifikasi masalah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima dan evaluasi mengenai pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto. Sementara Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan Program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto masih banyak terdapat permasalahan baik yang berasal dari pemerintah kota maupun dari pedagang kaki limanya. oleh sebab itu terdapat beberapa evaluasi seperti : evaluasi dari tahap penertiban pedagang kaki lima, evaluasi pada relokasi atau penyiapan lokasi , evaluasi pada bantuan permodalan yang diberikan untuk pedagang kaki lima dan juga evaluasi pada tahap pembinaan pedagang kaki lima itu sendiri.

**Kata kunci :** *Evaluasi kebijakan , Pemberdayaan PKL.*

---

## **Pendahuluan**

Seiring dengan berjalanya otonomi daerah dimana kewenangan cenderung dimiliki oleh daerah Kabupaten/Kota. Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah diperlukannya perubahan dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini telah terwujud dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Dengan pengembangan pembangunan daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL). Usaha ini apabila dikembangkan dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun Semakin meningkat keberadaan sektor informal ini dikhawatirkan akan menambah masalah di perkotaan, karena keberadaannya dianggap menciptakan kesemrawutan, kemacetan lalu lintas, dan mengganggu kebersihan dan keindahan fisik Kota. Salah satu contoh daerah atau Kota yang berhasil dalam melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima adalah Kota Solo. Kota Solo merupakan suatu daerah yang cukup sukses dalam penanganan ketertiban.

Keberhasilan Kota Solo dalam melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima seharusnya dijadikan contoh oleh beberapa daerah yang mengalami permasalahan yang sama mengenai pedagang kaki lima, seperti halnya Kota Mojokerto. Kota yang tergolong kecil dengan jumlah penduduk sebanyak 120.064 jiwa, sektor perdaganganlah yang menguasai perekonomian dan karakteristik Kota salah satunya usaha yang cukup banyak adalah Pedagang Kaki Lima dengan jumlah sekitar 1316 yang tersebar di dua Kecamatan Prajuritkulon dan Kecamatan Magersari pada tahun 2011.

Berbagai permasalahan terkait dengan pedagang kaki lima banyak bermunculan yang ternyata merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah Kota Mojokerto sendiri seperti Bila dilihat dari segi kebersihan, Dari segi keamanan, kenyamanan dan dari segi ketertiban. Upaya untuk melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sudah cukup sering dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto, khususnya ditangani oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dinas koperasi perindustrian dan perdagangan Kota Mojokerto. Dalam melakukan penataan

dan pembinaan pedagang kaki lima, pemerintah Kota Mojokerto sudah mempunyai peraturan daerah yang memang khusus mengatur mengenai pedagang kaki lima tersebut, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto beberapa tahapan, untuk penataan yaitu : Sosialisasi, Menertibkan, Merelokasi, Pembinaan manajemen usaha Pemberian bantuan modal. Apabila kita lihat, bahwa kebijakan tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sudah ditetapkan cukup lama, sudah berjalan hampir 7 tahun. Tetapi melihat kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena keberadaan pedagang kaki lima semakin hari bukannya semakin berkurang jumlahnya malah semakin bertambah banyak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan serta menganalisis pemetaan penataan pedagang kaki lima di wilayah Kota Mojokerto. Untuk mengetahui identifikasi masalah dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto. Untuk mengetahui evaluasi mengenai pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto.

## **Kajian Pustaka**

Pengertian evaluasi kebijakan public Menurut Winarno (2002, h.165) Evaluasi pada dasarnya dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali kebijakan publik gagal meraih hasil yang diinginkan, dengan demikian maksud evaluasi kebijakan itu ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Pengertian mengenai evaluasi kebijakan juga dikemukakan oleh Casley dan Kumar yang dikutip oleh Abdul Wahab (2001, h.23), merumuskan evaluasi itu sebagai penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu. Jadi dapat disimpulkan

Evaluasi kebijakan adalah juga suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan selama persiapan proyek sedang berjalan pada sebuah kebijakan. Kemudian dari hasil penilaian tersebut dapat menjadi acuan untuk memperbaiki segala permasalahan mengenai penataan dan pembinaan pedagang kaki lima untuk kedepannya tidak terulang kembali.

Evaluasi kebijakan memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan dalam Abdul Wahab (2002, h.51). Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah kita simpulkan tentang nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*). Pemberdayaan harus berawal dari kemauan politik (*political will*), para penguasa seperti yang dikemukakan oleh Reonard D.White dalam Suhendra (2006, h.77). Sedangkan Sulistyani (2004, h.80) menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasar dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses kepada pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Berdasarkan pengertian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau individu maupun kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan melalui proses yang terarah dan terus menerus dilaksanakan agar tercipta kemandirian masyarakatnya. Dalam proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Pendapat tentang penahapan pemberdayaan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sulistyani (2004, h. 83), tahap-tahap yang harus dilewati dalam pemberdayaan adalah:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat ini, dengan demikian dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat menggali peran dalam pembangunan. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi dalam lingkungannya

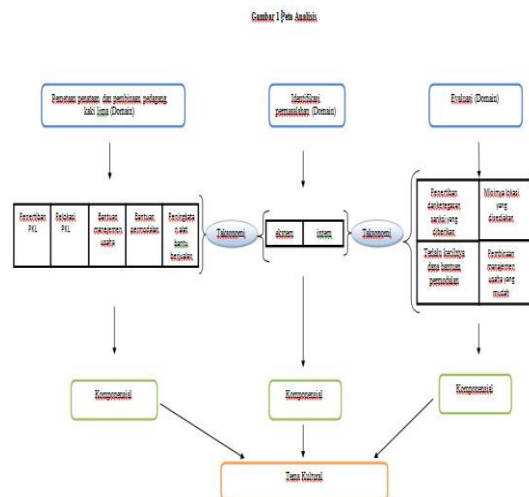
Pengertian pedagang kaki lima dalam Alma (2004, h. 64 ) orang ekonomi golongan lemah yang berjualan barang barang kebutuhan sehari hari , makanan , atau juga dengan modal relative kecil , modal sendiri atau orang lain , baik berjualan ditempat terlarang maupun tidak. Sedangkan pengertian pedagang kaki lima menurut Bromley dalam Manning dan Noer ( 1996 h. 229 ) pedagang kaki lima digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran yang luas dan pertumbuhan yang luar biasa dari jenis pekerjaan sektor tersier yang sederhana dikota dunia ketiga.

Dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah sekelompok orang atau masyarakat golongan lemah atau menengah kebawah yang mencoba mencari peluang pekerjaan dengan membuka usaha atau menjual barang dengan memanfaatkan pusat keramaian dan pinggir jalan. Barang barang yang dijual juga tergolong sederhana mulai dari makanan ,minuman ,pakian dan lain lain.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Lokasi dan Situs Penelitian Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di kota Mojokerto sedang situs penelitian adalah dinas koperasi perindustrian perdagangan dan kantor satuan polisi pamong praja Kota Mojokerto. Analisis data menggunakan model Spradley. Teknik analisis data menggunakan model Spradley ini tidak terlepas dari keseluruhan penelitian. Keseluruhan proses penelitian terdiri atas: pengamatan deskriptif, analisis domain, pengamatan terfokus, analisis taksonomi, pengamatan terpilih, analisis komponen, dan diakhiri dengan analisis tema.

### Hasil Dan Pembahasan



Pemetaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto. Jumlah pedagang kaki lima tersebar di 32 titik pada 2 kecamatan yang berjumlah 1316 pedagang kaki lima. Lokasi/Tempat kegiatan Pedagang kaki lima Jalan, trotoar, taman, lapangan, perkantoran, pasar dan tempat-tempat hiburan. Jenis barang dagangan Dengan memiliki modal dan ketrampilan yang sangat terbatas, mereka berjualan seadanya saja, Alat bantu dalam berjualan Bersifat menetap (tidak dapat digerakkan) seperti: meja atau tanpa tempat duduk (atau sejenisnya) dan Bersifat mobil (memiliki roda), mudah digerakkan atau didorong untuk sewaktu waktu dipindahkan.

Pengertian pedagang kaki lima dalam Alma (2004, h.64 ) orang ekonomi golongan lemah yang berjualan barang barang kebutuhan sehari hari , makanan , atau juga dengan modal relative kecil , modal sendiri atau orang lain , baik berjualan ditempat terlarang maupun tidak. Sedangkan pengertian pedagang kaki lima menurut Bromley dalam Manning dan Noer (1996 h. 229 ) pedagang kaki lima digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran yang luas dan pertumbuhan yang luar biasa dari jenis pekerjaan sektor tersier yang sederhana di Kota dunia ketiga.

Jika kita melihat pengertian dari pedagang kaki lima diatas terdapat 2 macam pedagang kaki lima yaitu dilihat dari lokasi mereka berjualan ada yang ditempat terlarang tapi ada juga yang berjualan pada

tempat yang sudah ditentukan. Jika dihubungkan dengan kondisi di lapangan, bahwa dapat dijelaskan pedagang kaki lima yang menempati tempat terlarang pada umumnya tidak memiliki izin untuk berdagang atau mendirikan bangunan ditempat mereka biasa berjualan menjajakan dagangannya. pedagang kaki lima yang menawarkan barang-barang atau menjual jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan serta di trotoar akan mengganggu lalu lintas mengurangi keindahan dan membuat Kota kelihatan kumuh. Hal ini merupakan sebuah masalah yang dihadapi oleh Kota Mojokerto. Dapat dilihat pada gambaran pedagang kaki lima di Kota Mojokerto yang rata-rata mereka berjualan pada jalan-jalan di Kota Mojokerto, Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi perindustrian dan perdagangan, dapat diketahui jumlah titik lokasi Pedagang kaki lima yang ada berjumlah 32 titik yang tersebar di 2 kecamatan Kota Mojokerto yang berjumlah 1316. Dengan memiliki modal dan ketrampilan yang sangat terbatas, mereka berjualan seadanya saja, yang mudah diperoleh serta dijual kembali. Mayoritas Pedagang kaki lima di Kota Mojokerto bercampur satu dengan yang lain, dengan barang dagangan yang berbeda-beda.

Pelaksanaan Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto. Sulistyani (2004 h.80) menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasar dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses kepada pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Berdasarkan pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau individu maupun kelompok untuk meningkatkan kemampuan dan kemandiriannya dalam meningkatkan taraf hidupnya

Kaitanya dengan pelaksanaan Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima adalah penataan dan pembinaan

pedagang kaki lima merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat khususnya pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto untuk memberikan kepastian usaha, perlindungan serta mengembangkan usaha PKL yang tertib, aman, selaras, dan serasi serta seimbang dengan lingkungannya. Tujuan dari penataan dan pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yaitu mewujudkan PKL sebagai usaha kecil yang berhak mendapat perlindungan dan pembinaan, sehingga dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi yang ditetapkan sesuai peruntukannya dengan kriteria yang ditetapkan dan mengembangkan ekonomi sektor informal melalui pembinaan PKL serta mewujudkan harmonisasi keberadaan PKL dengan lingkungannya. Dalam pelaksanaannya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima tersebut terdapat beberapa hal seperti : Penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan merupakan tahap awal apabila tindakan pembinaan telah dilakukan. Penertiban terutama dilakukan pada Pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas publik. Relokasi adalah tindakan pemindahan Pedagang kaki lima ke kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha yang diberikan kepada para pedagang kaki lima (PKL) ini bertujuan agar mereka dapat memanager atau mengatur usahanya dengan baik.

Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan permodalan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada PKL bagaimana cara mendapatkan modal dari Pemerintah Kota Mojokerto dan bagaimana untuk meningkatkan modal yang telah diperoleh. Alat bantu berjualan PKL yaitu alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang akan diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda. Dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto diatas, pemerintah Kota sudah berupaya untuk memberdayakan pedagang kaki lima dengan berusaha menciptakan suasana yang

memungkinkan masyarakat Mojokerto yang bekerja sebagai pedagang kaki lima untuk berkembang dengan pelaksanaan penataan dan pembinaan seperti hal di atas serta menyediakannya lokasi yang diperuntukan pedagang kaki lima untuk mengembangkan usaha mereka tanpa takut mengganggu ketertiban Kota dan kenyamanan Kota. penyediaan lokasi untuk para pedagang kaki lima ini juga membantu para pedagang untuk dapat berkembang agar dapat bersaing dengan usaha-usaha formal yang lebih besar.

Pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto merupakan sebuah Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui proses yang terarah dan terus menerus dilaksanakan agar tercipta kemandirian masyarakatnya. Dalam proses pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Hal tersebut sesuai dengan pendapat tentang penahapan pemberdayaan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2004, h.83), tahap-tahap yang harus dilewati dalam pemberdayaan adalah:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat menggali peran dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Tahap ini merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan-keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian.

Tahapan-tahapan yang diungkap oleh Sulistiyani di atas senada dengan tahap pelaksanaan kebijakan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto dari tahap

pertama penyadaran akan kesalahan pedagang kaki lima yang berjualan bukan pada tempat yang seharusnya kemudian dibimbing agar mereka mengerti dan tidak berjualan pada daerah-daerah yang terlarang. Untuk tahap kedua Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, tahap ini berupa bantuan dari pemerintah Kota lewat dinas koperasi perindustrian dan perdagangan memberi penyuluhan dan pelatihan manajemen usaha serta pemberian bantuan modal agar pedagang kaki lima dapat mengembangkan usaha serta cerdas untuk membuat strategi pemasaran untuk menjajakan dagangannya.

Untuk membantu pedagang kaki lima yang bermodal kecil supaya mendapatkan pinjaman. Sedangkan untuk tahap ketiga tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan untuk tahap ini sebenarnya hampir sama berupa bimbingan usaha namun lebih menekankan pada ketrampilan atau skill para pedagang kaki lima untuk menciptakan inovasi dagangan yang beda dari pedagang-pedagang kaki lima lain yang ada di Kota Mojokerto. Namun keselarasan hal tersebut tidak diselaraskan dengan keberhasilan yang ada di lapangan saat peneliti melakukan penelitian. Pada kenyataannya masih banyak penertiban yang ada di Kota Mojokerto hanya sekedar penertiban tanpa memberikan solusi dan kepastian lokasi yang disediakan hal itu terjadi karena lokasi yang disediakan pemerintah cukup terbatas dan hanya menampung beberapa pedagang kaki lima.

Setiap pelaksanaan sebuah kebijakan hampir semuanya dapat dipastikan terdapat masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya. Maka dari itu diperlukannya evaluasi kebijakan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan dampak yang diinginkan atau belum, hal ini sesuai dengan pendapat Winarno (2002, h.16) bahwa:

“Evaluasi pada dasarnya dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali kebijakan publik gagal meraih hasil yang diinginkan, dengan demikian maksud evaluasi kebijakan itu ditujukan

untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan”.

Dari sini dapat dilihat bahwa evaluasi digunakan untuk mengetahui apa saja yang menjadi sebab-sebab sebuah kebijakan berjalan maksimal atau tidak. Dan masalah-masalah dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Mojokerto contohnya seperti berikut ini

Masalah Internal dalam Pelaksanaan Pembinaan Pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto masih kesulitan dalam hal penyediaan lahan bagi para PKL dan juga kurang maksimalnya lokasi yang disediakan pemerintah Kota Mojokerto. Anggaran bantuan modal yang diberikan pemerintah Kota Mojokerto lewat dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto dalam membantu pedagang kaki lima di rasa sangat kecil. Pemberian sanksi kepada pedagang kaki lima yang melanggar selama ini kurang begitu tegas hal itu bisa dilihat pada penertiban pedagang kaki lima hanya sebatas penyitaan dan pembongkaran alat alat dan barang dagangan para pedagang.

Masalah Ekstern dalam penataan dan Pembinaan Pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan Oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Hal lain yang menyebabkan pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL ini terhambat adalah tingkat Pendidikan Para PKL. Tingkat pendidikan Para PKL rata – rata masih rendah. Banyak PKL yang hanya berpendidikan SMP atau Sederajat sehingga secara tidak langsung mereka kurang memiliki pengetahuan dan penguasaan tentang masalah Peraturan daerah no 5 tahun 2005 sehingga mereka tidak mengerti masalah – masalah pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Masalah karakteristik atau sifat dari setiap pedagang kaki lima (PKL) yang berbeda satu sama lainnya. Tingkat Heterogenitas dari PKL ini yang membuat sulit pemerintah Kota dalam pelaksanaan pembinaan PKL.

Dari beberapa masalah diatas jika dihubungkan dengan teori dari Winarno dapat dikatakan bahwa permasalahan diatas yang membuat pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang ada di Kota Mojokerto menjadi kurang maksimal. Permasalahan yang timbul mulai dari pedagang kaki lima itu sendiri sampai dengan yang timbul dari pemerintah Kota Mojokerto itu sendiri. Permasalahan seperti hal diatas seharusnya secepatnya diselesaikan dan dicari solusinya agar pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima pada tahap berikutnya dapat berjalan dengan maksimal tanpa ada permasalahan yang sama dengan penataan dan pembinaan yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

Setiap kebijakan yang dibentuk tentu akan ada evaluasi yang harus dilakukan agar dapat diketahui apakah kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan atau sudah tepat pada sasaran yang diberikan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Casley dan Kumar yang dikutip oleh Abdul Wahab (2001 h. 23) merumuskan evaluasi itu sebagai penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu. Begitu pula evaluasi program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto. Evaluasi disini digambarkan sesuai apa yang peneliti lihat dan amati dilapangan , beberapa evaluasi dari peneliti adalah sebagai berikut :

Sosialisasi program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta sanksi sanksi yang diberikan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan. Mempertegas sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang telah mendapat teguran atau bahkan penertiban sesuai dengan peraturan daerah no 5 tahun 2005 Kota Mojokerto yaitu pemberian sanksi kurungan 6 bulan dan denda sebesar Rp 500. 000 Pemberian sanksi kurungan dan denda tersebut agar member efek jera para pedagang kaki lima yang masih saja melanggar aturan.

Untuk kawasan pedagang kaki lima yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Mojokerto. Kawasan tersebut belum bisa mencakup semua pedagang kaki lima karena masih diprioritaskan untuk 2 kawasan saja.

Dalam hal ini seharusnya pemerintah Kota Mojokerto juga memikirkan kepentingan pedagang kaki lima di lokasi lainnya, karena ditakutkan akan membuat kecemburuan social oleh pedagang kaki lima karena dilihat pada saat dilapangan beberapa pedagang sudah mulai berdatangan untuk berdagang pada lokasi sekitaran benteng pancasila tersebut akan tetapi karena tidak mendapat tempat yang seharusnya mereka banyak berjualan pada pinggir pinggir jalan kembali.

Untuk sarana penunjang yang ada di lokasi relokasi juga sangat berpengaruh karena sering adanya komplek dari pedagang kaki lima mulai dari lokasi yang tergenang air saat hujan, toilet yang rusak padahal baru sebentar digunakan lahan parkir yang minim serta sarana pembuangan sampah yang kurang.

Memperbesar dana bantuan yang diberikan sehingga mencakup semua kalangan pedagang kaki lima mulai kalangan kecil hingga menengah. Memperkecil dana maksimum pemberian bantuan permodalan bagi pedagang kaki lima sehingga dana bantuan permodalan tersebut lebih bisa mencakup lebih banyak lagi pedagang kaki lima yang mendapatkan bantuan permodalan. Dalam memberikan pembinaan terhadap pedagang kaki lima seharusnya menggunakan pembekalan pembinaan dengan bahasa yang lebih dipahami oleh pedagang kaki lima karena rata-rata banyak pedagang kaki lima yang berpendidikan rendah sehingga mereka kurang mengerti dengan pembekalan pembinaan yang berbelit-belit.

Beberapa evaluasi diatas jika dihubungkan dengan teori yang dipaparkan oleh Casley dan Kumar yang dikutip oleh Abdul Wahab merumuskan evaluasi itu sebagai penilaian terhadap kinerja proyek dan dampaknya pada kelompok sasaran dan daerah tertentu. oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa evaluasi diatas merupakan penilaian yang terjadi pada program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto. Dalam kenyataannya program penataan dan pembinaan tersebut masih perlu banyak pembenahan dalam pelaksanaannya hal tersebut bisa dilihat dari kurang

maksimalnya lokasi yang disediakan oleh pemerintah Kota untuk pedagang kaki lima, bantuan permodalan yang kurang maksimal karena hanya sebagian pedagang saja yang mendapatkannya, kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh aparat pemerintah Kota dalam menindak pedagang kaki lima, perlunya proses pembinaan pedagang kaki lima yang mudah dipahami.

Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa dalam konteks kontribusi pemerintah untuk menjalankan program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto kurang begitu maksimal. Sehingga perlunya adanya sebuah evaluasi untuk memperbaiki atau membenahi kebijakan atau program

penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sehingga bisa menjadi lebih baik pada tahap penataan dan pembinaan pada tahap tahap berikutnya.

## **Penutup**

Evaluasi dari program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto yang sudah berjalan dalam 7 tahun sejak tahun 2005 sampai tahun 2012 ini masih itu berupa evaluasi dari tahap : a) penertiban pedagang kaki lima terkait dengan sosialisasi program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta sanksi sanksi yang diberikan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan dan Mempertegas sanksi yang diberikan pemberian sanksi kurungan 6 bulan dan denda sebesar Rp 500. 000. b) evaluasi pada relokasi atau penyiapan lokasi terkait pemberian lokasi berjualan dalam hal ini seharusnya pemerintah Kota Mojokerto juga memikirkan kepentingan pedagang kaki lima di lokasi lainnya, karena ditakutkan akan membuat kecemburuan social. Selain lokasi yang kurang maksimal penentuan lokasi relokasi yaitu di daerah Benteng Pancasila seakan mengadu peruntungan antara pasar modern dan tradisional. c) evaluasi pada bantuan permodalan yang diberikan untuk pedagang kaki lima seperti memperbesar dana bantuan yang diberikan sehingga mencakup semua kalangan pedagang kaki lima atau Memperkecil dana maksimum pemberian bantuan permodalan bagi setiap pedagang kaki lima. d) evaluasi



pada tahap pembinaan PKL, dalam memberikan pembinaan terhadap pedagang kaki lima seharusnya menggunakan pembekalan pembinaan dengan bahasa yang lebih dipahami oleh pedagang kaki lima.

### **Saran**

Melakukan pendekatan secara personal sehingga pedagang kaki lima merasa dihargai dan menampung aspirasi dari

pedagang kaki lima sehingga mereka bisa mengutarakan apa saja sebenarnya yang pedagang kaki lima butuhkan.

Lebih terintegrasinya dinas koperasi perindustrian perdagangan dan kantor satuan polisi pamong praja Kota Mojokerto yang bertugas dalam penanganan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, agar penataan dan pembinaan dapat berjalan dengan baik.

---

### **Daftar Pustaka**

- Alma, Buchari. (2004) **Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa**. Jakarta, CV. Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T. (2004) **Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan**. Yogyakarta, Gaya Media
- Suhendra, K.. (2006) **Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat**. Bandung, Alfabeta.
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. (1996) **Urbanisasi ,pengangguran dan sektor informal di Kota**. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Abdul Wahab, solichin. (2001) **Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara** (Ed. kedua). Jakarta, Bumi aksara.
- Abdul Wahab, Solichin. (2002) **Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara**. Jakarta, Sinar Grafika.
- Winarno , Budi. (2002) **Teori dan Proses Kebijakan Publik**. Jakarta, Media Pressindo.